

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ke depan, setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki, termasuk pekarangan, dalam menyediakan pangan bagi keluarga (Kementerian Pertanian, 2012 : 6).

Pembangunan pertanian dapat dikatakan berhasil apabila terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut maka harus ada langkah-langkah kebijakan yang harus diambil dalam pembangunan pertanian. Langkah-langkah kebijakan yang harus diambil tersebut meliputi usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, yang intinya tercakup dalam pengertian Trimatra Pembangunan Pertanian yaitu kebijakan usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu, disamping itu juga harus diperhatikan tiga komponen dasar yang harus dibina yaitu petani, komoditi hasil pertanian dan wilayah pembangunan di mana kegiatan pertanian berlangsung.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam perkembangan pembangunan pertanian kedepannya adalah masalah ketahanan pangan (*food security*) yang telah menjadi isu global selama dua dekade ini termasuk di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang pangan No 8 tahun 2012 pengganti Undang-undang pangan tahun No 7 tahun 1996 tentang Pangan disebutkan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”. Berdasarkan definisi tersebut, terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga merupakan tujuan sekaligus sebagai sasaran dari ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemantapan ketahanan pangan salah satunya dapat dilakukan melalui diversifikasi pangan di tingkat rumah tangga. (Saliem, 2011 : 1).

Diversifikasi pangan (penganekaragaman pangan) sangat penting peranannya dalam mewujudkan ketahanan pangan karena kualitas konsumsi pangan dipantau dengan menggunakan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Indonesia periode 2009-2011 mengalami fluktuasi mulai dari 75,7 tahun 2009. Dan naik menjadi 86,4 pada tahun 2010, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2011 dan 2012. Baru pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 88,2 yang masih belum mencapai target PPH menurut renstra (rencana strategi) Badan Ketahanan Pangan RI tahun 2010-2014 dan perpres No 22 tahun 2009 yaitu 91,5 (Badan Ketahanan Pangan RI, 2014).

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dikenalkan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi telo (ubi jalar), kacang dan jagung yang dikenal dengan tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang merupakan kontrak kerja antara Menteri Pertanian RI dengan Presiden selama tahun 2009-2014.

Rencana strategis Kementerian Pertanian yaitu Empat sukses pertanian, diantaranya: peningkatan swasembada dan swasembada berkelanjutan; peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; dan peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan diversifikasi pangan termasuk ke dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI tersebut. Komitmen Pemerintah untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan perlu diaktualisasikan dalam menggerakkan kembali budaya menanam di lahan pekarangan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. (Kementerian Pertanian, 2011).

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menyusun suatu konsep yang disebut dengan “Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Model KRPL)” yang merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang

untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sasarannya adalah KWT (Kelompok Wanita Tani). Program KRPL merupakan perpaduan antara program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Gerakan Perempuan Optimalisasi Pekarangan (GPOP). P2KP adalah program yang dilaksanakan secara massal mengingat permintaan beras terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim global, dampak pemberian Raskin semakin mendorong masyarakat yang makanan pokoknya non beras menjadi beras (nasi) serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal. Sedangkan GPOP adalah pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Tujuan GPOP ini adalah untuk memberdayakan perempuan pedesaan dan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. (Kementerian Pertanian, 2011).

Menurut Suhardiyono (1992 : 27), Dalam pelaksanaan kegiatan KRPL tidak terlepas dari peran serta penyuluh yang bertugas mendampingi KWT. Suatu tanggung jawab yang benar untuk membawa perubahan yang progresif di bidang pertanian terletak di tangan para penyuluh lapangan, karena di tangan merekalah para petani (dalam hal ini KWT) mengharapkan bantuan berupa bimbingan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya penyuluh pendamping diharapkan dapat membantu KWT dalam pelaksanaan kegiatan program KRPL sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

Sasaran yang ingin dicapai KRPL ini adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2011). Konsep kawasan rumah pangan lestari tidak sekedar pemanfaatan lahan pekarangan saja, namun termasuk konsep kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan dan kebun bibit (Wiendarti, 2012 : 76).

Kegiatan program MKRPL yang telah berjalan dari tahun 2012 perlu dievaluasi. Evaluasi program yang dilakukan tersebut adalah untuk mengkaji kembali *draft* atau usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini selain bertujuan untuk mengkaji kembali keberhasilan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman atau patokan-patokan yang diberikan, juga dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang mereka rumuskan itu (Mardikanto, 2009 : 383).

Pada dasarnya evaluasi perlu untuk dilakukan dalam setiap kegiatan, program atau proyek yang sedang dijalankan. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan. Evaluasi itu bisa dilakukan dalam perencanaan, kegiatan sedang berjalan atau kegiatan itu sudah selesai dijalankan. Dengan adanya evaluasi, maka kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan itu bisa diperbaiki, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan bisa memperoleh hasil yang akan maksimal dan sempurna (Setyodarmodjo, 2003 : 213).

## **B. Perumusan Masalah**

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang menjadi pelaksana program MKRPL. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat mengembangkan model KRPL pada 13 Kabupaten/Kota (Lampiran 1). Salah satu daerah yang terpilih sebagai percontohan pelaksana MKRPL adalah KWT Sungai Laban yang terletak di Korong Sungai Laban Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman sejak awal tahun 2012. Terpilihnya KWT Sungai Laban sebagai pelaksana program MKRPL karena memiliki beberapa keunggulan dibanding kelompok lain seperti: a) antusias anggotanya yang sangat tinggi dalam melaksanakan program tersebut, b) ternak peliharaan petani tidak berkeliaran, c) banyak terdapat sumber bahan organik, d) luas lahan pekarangan anggota KWT yang beragam, e) kondisi lahan yang subur dan sangat berpotensi untuk penanaman sayur-sayuran serta f) akses dengan lembaga penyuluhan yang sangat lancar. Semua keunggulan tersebut memantapkan pilihan terhadap KWT



Sungai Laban sebagai pelaksana MKRPL (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat, 2012).

Peserta MKRPL Sungai Laban yang mengikuti program berjumlah 15 KK. Sebanyak 73,3 % mempunyai lahan pekarangan sempit ( $<120 \text{ m}^2$ ) berjumlah 11 KK dan 26,7 % pekarangan sedang ( $120\text{-}400 \text{ m}^2$ ) berjumlah 4 KK sesuai dengan luas pekarangan maka budidaya yang diterapkan lebih banyak model rak vertikultur, *polibag*, pot dan bedengan. Lahan pekarangan umumnya telah dipagar dengan bambu. Sebagian masyarakat telah mulai memanfaatkan pekarangan dengan tanaman sayuran, bumbu dapur dan buah-buahan. Komoditas yang telah ditanam masyarakat antara lain: cabe merah, tomat, terung, kacang panjang, dan bumbu dapur.

Kelompok Wanita Tani Lestari Sungai Laban telah mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program dari Kementerian Pertanian tersebut, hal ini di karenakan anggota yang memiliki kemauan dalam penerapan KRPL di pekarangan rumah mereka. KWT Sungai Laban telah mampu menjual hasil dari tanaman yang mereka budidayakan di pekarangan rumah mereka. Selain itu KWT Sungai Laban juga ikut dalam melakukan berbagai macam pelatihan dan pertemuan dalam rangka pelaksanaan KRPL.

Rumah tangga pelaksana M-KRPL ini selanjutnya dijadikan sebagai contoh untuk dikembangkan oleh rumah tangga lain dalam kawasan pengembangan yang sudah ditetapkan. M-KRPL diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, mengurangi biaya konsumsi pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Berdasarkan kondisi di atas, maka penting sekali bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dan gizi keluarga serta membantu kegiatan ekonomi produktif keluarga, dengan pengembangan program KRPL diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program MKRPL yang dilaksanakan oleh KWT Sungai Laban telah berjalan sejak tahun 2012, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang berhubungan dengan manfaat (*benefit*) dari pelaksanaan program MKRPL terhadap anggota KWT. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi maka, akan dapat diketahui kelemahan dalam

pelaksanaan selama ini sehingga dapat direncanakan kegiatan yang lebih baik untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengevaluasi manfaat program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) pada KWT Sungai Laban, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul. **“Evaluasi Manfaat Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Sungai Laban, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman”**.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

Mengevaluasi manfaat program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) pada KWT Sungai Laban, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Peneliti

Bagi Peneliti dan akademisi diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang evaluasi kebijakan pemerintah.

#### 2. Kelompok Wanita Tani Sungai Laban

Bagi KWT Sungai Laban penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan usaha – usahanya, sehingga kelompok tersebut dapat lebih berkembang dan mandiri dengan adanya bantuan dari pemerintah.

#### 3. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kajian ilmu pengembangan

wilayah dan juga dapat memberikan informasi dan masukan bagi para pembuat kebijakan.

